

Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Mendukung Pengentasan Kemiskinan Di Perdesaan

Yopi Saleh dan Yayat Hidayat

*Peneliti Sosial Ekonomi Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Maluku Utara
Komplek Pertanian Kusu No. 1 Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi
Maluku Utara*

Abstract

Poverty in rural areas is a central issue of national mitigation which can't be postponed and should be a priority in the implementation of social welfare development. Lack of access to capital sources, markets and technologies, as well as farmer's organizations are still weak to be one of our problem. Optimizing the potential of existing financial institutions could be an alternative source of funding for farmers and rural communities, namely the development of MFIs. To that end, this paper aims to identify the problems of MFIs, to analyzes the potential of MFI's which can use as basis for the future development strategy and key success factors of empowerment MFI. From the discussion, MFIs development can be the one of effective solution in reducing poverty with the help of the role and intervention of various parties, both governmental, non-governmental and community. This can seen from the success of the empowerment of MFIs that have been implemented in Bangladesh, Philipine and China.

Keywords: *MFI, Poverty, Rural.*

Pendahuluan

Strategi percepatan penanggulangan kemiskinan seperti yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dapat dilakukan dengan beberapa cara diantaranya adalah melalui peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin serta pengembangan dan jaminan keberlanjutan usaha mikro dan kecil.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tahun 2010 jumlah penduduk miskin tercatat 31,023 juta jiwa. Dari jumlah tersebut sekitar 19,925 juta jiwa (64,23%) berada di perdesaan dengan mata pencaharian utama di sektor pertanian. Pada umumnya petani di perdesaan berada pada skala usaha mikro yang memiliki luas lahan lebih kecil dari 0,3 hektar. Kemiskinan di perdesaan merupakan masalah pokok nasional yang penanggulangannya tidak dapat ditunda dan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu pembangunan ekonomi nasional berbasis pertanian dan perdesaan secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada pengurangan penduduk miskin (Kemtan, 2010).

Kegiatan perekonomian di perdesaan masih didominasi oleh usaha-usaha skala mikro dan kecil dengan pelaku utama para petani, buruh tani, pedagang sarana produksi dan hasil pertanian, pengolah hasil pertanian serta industri rumah tangga. Kementerian Koperasi dan UKM (2008) menginformasikan bahwa sampai

dengan akhir tahun 2007 jumlah unit usaha UMKM telah mencapai 49,258 juta, atau 99,99% dari pelaku bisnis yang ada di Indonesia. Dari jumlah tersebut 46,795 juta atau 95,2% adalah pengusaha mikro. Menurut Sutanto (2007) sebagian besar mengusaha mikro terutama yang bergerak di sektor pertanian dan sektor informal memiliki pendapatan bersih kurang dari USD 1.440 per keluarga per tahun. Dengan pendapatan sekecil itu mereka masih tergolong kelompok miskin yang berpendapatan kurang dari USD 1 per orang per hari. Namun demikian kelompok usaha ini menyerap lebih kurang 89 juta tenaga kerja atau identik dengan 96,7% tenaga kerja yang ada dalam dunia usaha (Yoseva dan Teuku Syarif, 2010).

Permasalahan mendasar yang dihadapi petani adalah kurangnya akses kepada sumber permodalan, pasar dan teknologi, serta organisasi tani yang masih lemah. Untuk itu penanggulangan kemiskinan merupakan bagian dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan kesepakatan global untuk mencapai Tujuan Pembangunan Milenium.

Untuk menjawab permasalahan keterbatasan modal, maka perlu lebih mengoptimalkan potensi lembaga keuangan yang dapat menjadi alternatif sumber dana bagi petani dan masyarakat perdesaan. Salah satu kelembagaan keuangan yang dapat dimanfaatkan dan didorong untuk membiayai kegiatan perekonomian di perdesaan yang mayoritas usaha penduduknya masuk dalam segmen mikro adalah Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Lembaga ini sebenarnya telah banyak tumbuh dan mengakar dalam masyarakat perdesaan, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal.

Tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan LKM, menganalisis potensi LKM yang dapat dijadikan dasar dalam strategi pengembangannya di masa depan serta faktor-faktor kunci keberhasilan pemberdayaan LKM di negara Bangladesh, Filipina dan Cina dalam mendukung pengentasan kemiskinan di perdesaan.

Bahan dan Metode

Tulisan ini merupakan hasil kajian literatur tentang strategi pengembangan LKM yang ada di Indonesia dalam upayanya mengentaskan kemiskinan di perdesaan serta melakukan perbandingan dan analisis dengan strategi pengembangan LKM di negara Bangladesh, Filipina dan China. Tulisan diawali dengan bahasan mengenai pengertian LKM dan hubungan LKM dalam pengentasan kemiskinan. Kemudian berikutnya adalah analisis permasalahan, potensi dan tantangan LKM. Bagian selanjutnya membahas tentang strategi pengembangan LKM yang dilakukan negara Bangladesh, Filipina dan Cina. Bagian terakhir adalah sebuah pemikiran tentang strategi pengembangan LKM di Indonesia dalam pengentasan kemiskinan di perdesaan.

Hasil dan Pembahasan

Tinjauan Teoritis Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

Menurut definisi yang dipakai dalam *Microcredit summit* (1997) dalam Wijono (2005), kredit mikro adalah program pemberian kredit berjumlah kecil kepada warga miskin untuk membiayai kegiatan produktif yang dikerjakan sendiri agar menghasilkan pendapatan, yang memungkinkan mereka peduli terhadap diri

sendiri dan keluarganya. Bank Indonesia (BI) mendefinisikan kredit mikro sebagai kredit yang diberikan kepada para pelaku usaha produktif baik perorangan maupun kelompok yang mempunyai hasil penjualan paling banyak Rp. 100 juta per tahun. Sementara oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) kredit mikro didefinisikan sebagai pelayanan kredit dibawah Rp. 50 juta.

Lembaga keuangan yang terlibat dalam penyaluran kredit mikro ini umumnya disebut dengan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). *Asian Development Bank* (ADB) mendefinisikan LKM sebagai lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan (*deposits*), kredit (*loan*), pembayaran berbagai transaksi jasa (*payment services*) serta *money transfer* yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil. Dengan demikian LKM memiliki fungsi sebagai lembaga yang memberikan berbagai jasa keuangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta usaha mikro. Menurut Direktorat Pembiayaan, Deptan (2004) LKM dikembangkan berdasarkan semangat untuk membantu dan memfasilitasi masyarakat miskin tersebut, baik untuk kegiatan konsumtif maupun produktif keluarga miskin tersebut. Berdasarkan fungsinya, maka jasa keuangan mikro yang dilaksanakan oleh LKM memiliki ragam yang luas yaitu bentuk kredit maupun pembiayaan lainnya (Ashari, 2006).

Salah satu model lembaga keuangan mikro yang berhasil dan sudah banyak diadopsi oleh banyak negara di dunia adalah *Grameen Bank*. Model ini sudah dikenal secara luas sebagai salah satu lembaga keuangan mikro tersukses di dunia dalam mengurangi kemiskinan yang ada, dikarenakan cepatnya ekspansi dan jangkauan yang luas terhadap masyarakat miskin dengan dampak positif pada pendapatan, pekerjaan, konsumsi, tabungan dan aset dari pesertanya (Sinha, 1996, Khandker *et al.*, 1998, dalam Mahmudul Hassan, 2006).

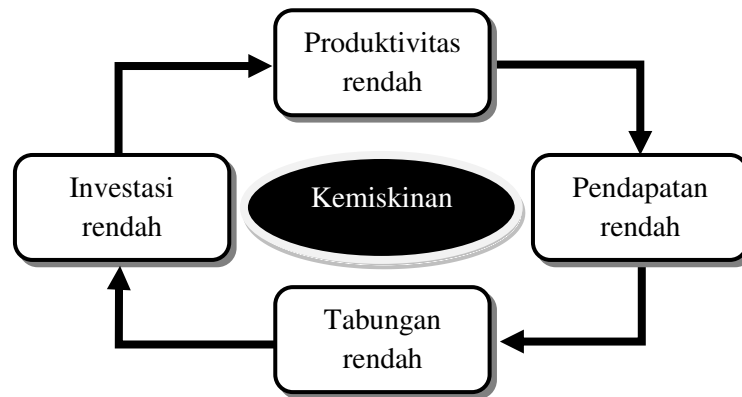
LKM dan Pengentasan Kemiskinan

Lembaga keuangan mikro merupakan institusi yang menyediakan jasa-jasa keuangan penduduk yang berpendapatan rendah dan termasuk dalam kelompok miskin. Lembaga keuangan mikro ini bersifat spesifik karena mempertemukan permintaan dana penduduk miskin atas ketersediaan dana. Bagi lembaga keuangan formal perbankan, penduduk miskin akan tidak dapat terlayani karena persyaratan formal yang harus dipenuhi tidak dimiliki.

Bersamaan dengan itu, lembaga pembiayaan informal juga beroperasi dalam perekonomian masyarakat termasuk masyarakat pertanian. Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro termasuk lembaga pembiayaan informal merupakan langkah yang tepat dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan pengembangan ekonomi rakyat (Krisnamurti, 2005 dan Anonimous, 2006 dalam Nurmanaf 2007). Sebagai penyedia dana bagi petani, lembaga informal dinilai sangat fleksibel dan relatif mudah diakses karena tidak memerlukan prosedur administrasi yang rumit seperti halnya lembaga pembiayaan formal.

Secara umum kondisi masyarakat di perdesaan tergolong miskin berada dalam kondisi dengan pendapatan yang rendah akibatnya tidak ada sisa uang yang dapat ditabung. Karena tidak punya tabungan, tidak ada uang untuk diinvestasikan. Dengan tidak ada investasi ini menyebabkan produktivitas masyarakat miskin rendah. Hal ini terjadi karena masyarakat miskin umumnya

berada dalam suatu siklus kemiskinan yang mempengaruhi satu dengan lainnya dan berulang terus-menerus. Siklus kemiskinan masyarakat ini perlu mendapatkan perhatian sehingga masyarakat dapat keluar dari siklus yang mereka hadapi dengan cara memutus mata rantai dari siklus kemiskinan tersebut melalui pemberdayaan LKM sebagai sumber permodalan bagi masyarakat miskin tersebut.

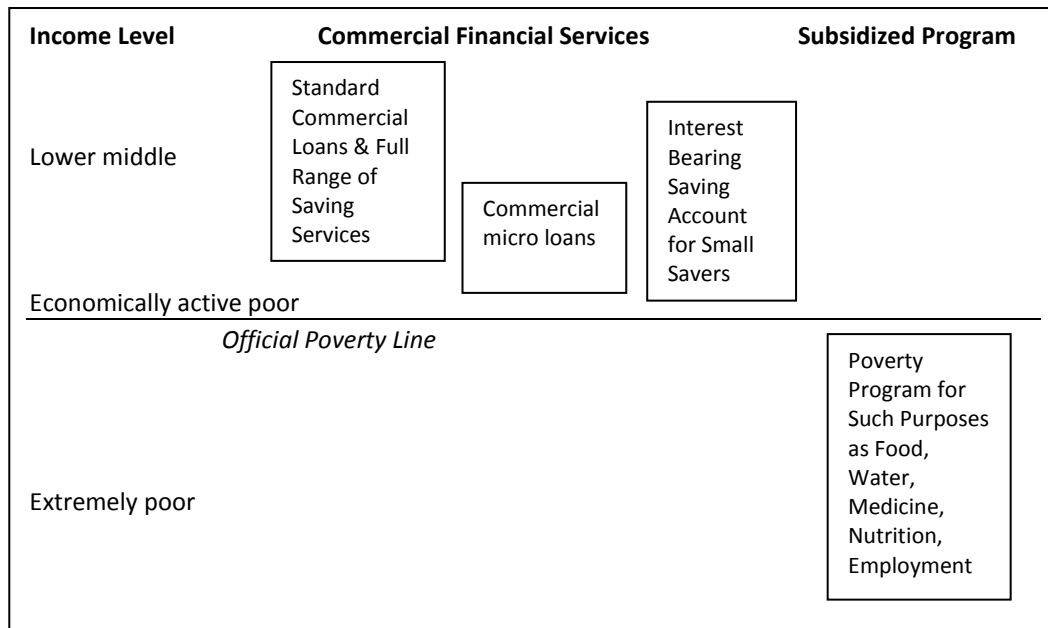


Gambar 1. Siklus kemiskinan di perdesaan

Pengentasan kemiskinan dapat dilaksanakan melalui banyak sarana dan program baik yang bersifat langsung maupun tak langsung. Usaha ini dapat berupa *transfer payment* dari pemerintah misalnya, program pangan, kesehatan, pemukiman, pendidikan, keluarga berencana, maupun usaha yang bersifat produktif misalnya melalui pinjaman dalam bentuk *micro credit*.

Menurut Marguiret Robinson (2000) dalam Wijono (2005), pinjaman dalam bentuk *micro credit* merupakan salah satu upaya yang ampuh dalam menangani kemiskinan. Hal tersebut didasarkan bahwa pada masyarakat miskin sebenarnya terdapat perbedaan klasifikasi diantara mereka, yang mencakup: *pertama*, masyarakat yang sangat miskin (*the extreme poor*) yakni mereka yang tidak berpenghasilan dan tidak memiliki kegiatan produktif, *kedua*, masyarakat yang dikategorikan miskin namun memiliki kegiatan ekonomi (*economically active working poor*), dan *ketiga*, masyarakat yang berpenghasilan rendah (*lower income*) yakni mereka yang memiliki penghasilan meskipun tidak banyak. Kategori ini dapat dilihat pada Gambar 2.

Pendekatan yang dipakai dalam rangka pengentasan kemiskinan tentu berbeda-beda untuk ketiga kelompok masyarakat tersebut agar sasaran pengentasan kemiskinan tercapai. Bagi kelompok pertama akan lebih tepat jika digunakan pendekatan langsung berupa program pangan, subsidi atau penciptaan lapangan pekerjaan. Sedangkan bagi kelompok kedua dan ketiga, lebih efektif jika digunakan pendekatan tidak langsung misalnya penciptaan iklim yang kondusif bagi pengembangan UKM, pengembangan berbagai jenis pinjaman mikro atau mensinergikan UKM dengan para pelaku Usaha Menengah maupun Besar.



Gambar 2. *Financial Services in The Poverty Alleviation Toolbox* (dalam Wijono, 2005).

Permasalahan, Potensi Dan Tantangan LKM

A. Permasalahan LKM

Perkembangan LKM masih dihadapkan pada berbagai kendala baik hambatan internal LKM maupun kondisi eksternal LKM yang kurang kondusif. Menurut Wijono (2005) permasalahan eksternal yang dihadapi oleh LKM adalah aspek kelembagaan, yang antara lain mengakibatkan bentuk LKM beraneka ragam. BRI Unit dan BPR sebagai bagian dari LKM secara kelembagaan lebih jelas karena mengacu pada ketentuan perbankan dengan pembinaan dari Bank Indonesia, sehingga LKM jenis ini lebih terarah bahkan terjamin kepercayaannya karena merupakan bagian dari kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dan berhak mendapatkan fasilitas dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Sedangkan pada LKM yang berbentuk koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam, segala ketentuan operasional dan arah pengembangannya mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Bahkan, bagi LKM lainnya yang berbentuk Bank Kredit Desa, LDKP, *credit union* maupun lembaga non pemerintah lainnya tidak jelas kelembagaan dan pembinaannya. Padahal, fungsi LKM tidak berbeda dengan lembaga perbankan formal dalam hal sebagai lembaga intermediasi keuangan, yang didalamnya juga mengemban kepercayaan dari nasabah atau anggota yang menempatkan dananya. Kondisi kelembagaan yang beragam dan tidak jelas tersebut, akan dapat mempersulit pengembangan LKM di masa mendatang. Padahal secara fakta LKM mempunyai peranan yang signifikan dalam mendukung perkembangan UKM. Kondisi infrastruktur dan kelembagaan LKM secara ringkas terlihat dalam Tabel 1.

Tabel 1. Kondisi infrastruktur dan kelembagaan LKM

Aspek	BPR & BRI Unit	Koperasi	LKM Lainnya
Regulasi	UU tentang Perbankan	UU tentang Koperasi	Tidak ada
Regulator	Bank Indonesia	Menteri Koperasi & UKM	Tidak ada
Pembinaan	Bank Indonesia	Menteri Koperasi & UKM	Tidak ada
Penjaminan	Pemerintah	Tidak ada	Tidak ada
Likuiditas	Bank Indonesia	Tidak ada	Tidak ada
Rating	Bank Indonesia – Tingkat Kesehatan	Menteri Koperasi & UKM	Tidak ada
Asosiasi	Perbarindo - Asbisindo	Induk Koperasi – Pusat Koperasi	PINBUK/ Credit Union

Sumber : Wahyudin *dalam* Wijono (2005).

Selain masalah eksternal di atas, LKM juga dihadapkan masalah internal yang menyangkut aspek operasional dan pemberdayaan usaha. Masalah pertama menyangkut kemampuan LKM dalam menghimpun dana, sebagian besar LKM masih terbatas kemampuannya karena masih bergantung sedikit banyaknya anggota atau besaran modal sendiri. Kemampuan SDM LKM dalam mengelola usaha sebagian besar masih terbatas, sehingga dalam jangka panjang akan mempengaruhi perkembangan usaha LKM bahkan dapat menghambat. Ringkasan permasalahan LKM disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Potensi dan permasalahan yang dihadapi LKM

Aspek	BPR & BRI Unit	Koperasi	LKM Lainnya
Kemampuan menghimpun dana	Mengandalkan tingkat suku bunga > rata-rata bank umum	Mengandalkan jumlah anggota	Mengandalkan modal sendiri dan anggota
Kemampuan menyalurkan dana	Rasio Loan to Deposit Ratio (LDR), namun kualitasnya perlu diperhatikan	Terbatas karena kemampuan SDM dan pengalaman usaha	Terbatas karena kemampuan SDM dan pengalaman usaha
Kemampuan manajemen operasional	Tergantung pada beberapa SDM kunci	Tergantung pada pengurus	Tergantung pada pengurus
Kemampuan menghasilkan laba	Relatif lebih baik dibandingkan bank umum	Tergantung dari kemampuan pengurus dan komitmen anggota	Tergantung dari kemampuan pengurus dan komitmen anggota
Kemampuan jaringan dan akses pasar	Fokus pada usaha perdagangan	Masih terbatas	Masih terbatas
Kemampuan perencanaan dan pelaporan	Masih beragam, khususnya BPR yang mempunyai modal terbatas & yang beroperasi di luar Jawa dan Bali	Masih kurang	Masih kurang

Sumber : Wahyudin *dalam* Wijono (2005).

Kebanyakan LKM seperti LKM milik pemerintah, LKM proyek, maupun LKM-LSM menghadapi persoalan mengenai keberlanjutan aktivitas mereka. Sebab ketidakmampuan menjaga mengenai keberlanjutan mereka dapat bermacam-macam mulai dari ketergantungan terhadap *support* baik dari pemerintah dan donor, hanya merupakan proyek yang memang didesain untuk sementara waktu saja, ketiadaan sistem keuangan mikro yang memadai, dan ketidakmampuan beradaptasi dengan situasi pasar keuangan mikro yang ada. Menghadapi masalah ini, kiranya perlu diingat bahwa aktivitas keuangan mikro hanya akan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap rakyat miskin manakala pelayanan keuangan mikro yang diberikannya dapat berlanjut (Ismawan, 2002).

B. Potensi LKM

Pembahasan tentang pengentasan kemiskinan di perdesaan berhubungan erat dengan pertumbuhan ekonomi yang kecil di perdesaan. Dimana perekonomian perdesaan tidak dapat mengabaikan pelaku ekonomi masyarakat perdesaan yang umumnya berskala mikro dan kecil. Secara faktual di sektor pertanian dan perdesaan, usaha kecil (termasuk skala mikro) memiliki kontribusi yang sangat signifikan terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Berdasarkan data dari Kementerian KUKM (2009) menunjukkan bahwa pada tahun 2007 usaha berskala kecil berkontribusi sebesar 42,61% terhadap PDB nasional. Kontribusi usaha kecil dalam penyerapan tenaga kerja juga amat dominan. Pada tahun 2007, jumlah tenaga kerja yang terserap di usaha kecil mencapai 87,73 juta orang atau 94,3% dari total tenaga kerja nasional.

Keterbatasan usaha kecil dan mikro dalam mengakses lembaga perbankan formal merupakan potensi pasar yang sangat besar yang bisa menjadi ladang garapan LKM. Data Kementerian KUKM (2009) menyebutkan bahwa pada tahun 2008 terdapat lebih dari 26,4 juta unit usaha mikro dan kecil yang bergerak di sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan. Jika dengan asumsi setiap unit usaha mikro dan kecil rata-rata memerlukan Rp. 1-5 juta untuk modal usaha, maka akan ada potensi *demand* untuk pembiayaan sekitar Rp. 26,4 – 132 triliun yang bisa dilayani oleh LKM.

Walaupun secara umum biaya atas dana pinjaman dari LKM lebih tinggi sedikit dari tingkat bunga perbankan, namun dalam sisi prosedur/administrasi peminjaman, LKM (terutama untuk LKM non bank) memiliki beberapa keunggulan. Diantara keunggulan tersebut adalah tidak ada persyaratan agunan/jaminan seperti diberlakukan pada perbankan formal. Bahkan dalam beberapa jenis LKM, pinjaman lebih didasarkan pada kepercayaan karena biasanya peminjam sudah dikenal oleh pengelola LKM. Kemudahan lainnya adalah pencairan dan pengembalian pinjaman sangat fleksibel dan seringkali disesuaikan dengan *cash flow* peminjam.

Potensi yang dapat diperankan LKM dalam memacu pertumbuhan ekonomi dalam rangka pengentasan kemiskinan di perdesaan sangat besar. Hal ini didukung dengan alasan sebagai berikut: (1) LKM umumnya berada atau minimal dekat dengan kawasan perdesaan sehingga dapat dengan mudah diakses oleh pelaku ekonomi/petani di desa; (2) masyarakat/petani desa lebih menyukai proses

yang singkat dan tanpa banyak prosedur; (3) karakteristik usaha umumnya membutuhkan plafon kredit yang tidak terlalu besar sehingga sesuai dengan kemampuan finansial LKM; (4) dekatnya lokasi LKM dan petani memungkinkan pengelola LKM memahami betul karakteristik usaha sehingga dapat mengucurkan kredit secara tepat waktu dan jumlah; dan (5) adanya keterkaitan *socio-cultural* serta hubungan yang bersifat personal-emosional diharapkan dapat mengurangi sifat *moral hazard* dalam pengembalian kredit (Ashari, 2006).

C. Tantangan LKM

Pengembangan LKM di Indonesia saat ini masih dihadang tantangan yang harus dipecahkan agar pertumbuhannya maksimal. Tantangan ini perlu dicari solusinya agar LKM mampu menembus hingga ke lapisan masyarakat yang paling sulit dijangkau di daerah (Kompas, 2011). Tantangan tersebut adalah:

1. Operasional LKM yang menghimpun dana dari masyarakat belum memiliki dasar hukumnya. Sebab, undang-undang (UU) perbankan yang ada saat ini hanya memberikan kewenangan pemungutan dana masyarakat pada perbankan nasional.
2. Merumuskan dasar hukum LKM yang selaras dengan lembaga lain. LKM harus memberi perlindungan yang berasaskan kehati-hatian.
3. Membangun pengawasan, karena LKM tersebar hingga wilayah terpencil.
4. Rendahnya pembinaan UMKM.
5. Perlu mengintegrasikan LKM pada sektor keuangan. Ini memerlukan kepatuhan dan tata kelola yang baik serta pengawasan yang teratur untuk memastikan keberlanjutan pelayanan keuangan LKM pada masyarakat miskin dalam jangka panjang.
6. Mengimplementasikan peran pemerintah yang tepat dalam pengembangan keuangan mikro. Mendorong LKM menjadi katalisator pengembangan kewirausahaan.

Strategi Pengembangan LKM Di Negara Bangladesh, Filipina, dan Cina

A. Strategi dan Kunci Keberhasilan LKM di Bangladesh

Menurut David S. Gibbons, dalam Djumilah Zain (1996), faktor-faktor yang melatarbelakangi keberhasilan Bangladesh dengan pola *Grameen Bank*-nya adalah:

- a. Adanya hubungan yang erat antara *Grameen Bank* dengan anggota yang dibina dan antara sesama anggota binaan itu sendiri.
- b. Kontrol dan solidaritas kelompok untuk meminimalisir peluang terjadinya pelanggaran terhadap aturan bersama.
- c. Kesungguhan dalam mendekati rumah tangga miskin.
- d. Pembentukan dan pengkondisian kelompok memerlukan waktu yang cukup lama.
- e. Ketekunan dan kesabaran sebagai modal *Grameen Bank*.
- f. Manajer *Grameen Bank* mampu menciptakan kesan yang baik di lingkungannya.

Bangladesh dianggap sebagai pelopor di dunia untuk menerapkan dan mencapai keberhasilan dalam pengembangan lembaga keuangan mikro untuk

pengentasan kemiskinan. Faktanya bahwa industri keuangan mikro telah mampu menyediakan akses kredit bagi orang miskin. Menurut Puspa Raj Sharma (2007), strategi yang membuat LKM berhasil di Bangladesh adalah:

- a. Membangun kelembagaan – Kepemimpinan dan insentif staf.
Visi dan usaha para pimpinan LSM/LKM merupakan faktor kunci kesuksesan industri keuangan mikro di Bangladesh. Keterampilan pemimpin berperan pada tahap awal dalam membujuk publik yang skeptis bahwa memberikan kredit kepada orang miskin bisa menjadi proposisi yang layak dan ditiru. Keterampilan ini termasuk kemampuan untuk merekrut dan memotivasi staf, desentralisasi kewenangan dari pusat, membangun sistem informasi manajemen dan kontrol internal serta memiliki kerendahan hati untuk belajar dari kesalahan. Selain itu, setelah para pemimpin organisasi-organisasi ini menunjukkan bahwa pengembangan yang mungkin dan pandangan ini menjadi bagian budaya dari staf lain yang memiliki kepercayaan diri untuk memperluas program-program di dalam kewenangan mereka sendiri (Khandker, 2003).
- b. Hubungan donor-klien konstruktif.
Sumber daya eksternal dapat membantu perluasan dan penguatan LKM. LKM umumnya telah mampu mengelola bantuan dari donor mulai dari awalnya tingkat nasional kemudian akan berkembang ke internasional. Investasi donor ini dimanfaatkan untuk pengembangan LKM dan perlahan-lahan mengurangi ketergantungan donor tersebut hingga seminimal mungkin.
- c. Lingkungan makroekonomi dan peraturan yang mendukung.
Tingkat inflasi dijaga stabil dalam satu digit dan pertumbuhan ekonomi selama dekade terakhir rata-rata 5% per tahun, sehingga menciptakan peluang investasi bagi pembiayaan kredit mikro.
- d. Kepadatan penduduk, homogenitas etnis dan umat beragama yang konservatif.
Bangladesh memiliki penduduk dengan etnis yang relatif homogen, kepadatan penduduk yang tinggi dan jaringan komunikasi yang baik. Masyarakat Bangladesh termasuk memiliki agama yang lebih konservatif dibandingkan negara-negara tetangganya sehingga toleransi terhadap kegiatan keuangan mikro, pemberdayaan ekonomi melalui mobilitas perempuan tinggi.
- e. Badan pengelola yang profesional dalam keuangan mikro.
Palli Karma Sahayak Foundation (PKSF) yang didirikan pada tahun 1990 merupakan badan tertinggi publik-swasta yang menyalurkan dana keuangan mikro kepada LKM dan berpengaruh dalam perluasan dan peningkatan profesionalisme industri kredit mikro di Bangladesh. Fungsi utama PKSF meliputi (i) meminjamkan uang kepada LKM yang memenuhi kriteria tertentu untuk mengembangkan keuangan mikro mereka, (ii) membantu memperkuat LKM untuk keberlanjutan usaha melalui peningkatan kapasitas/pelatihan dan pendampingan, dan (iii) advokasi keuangan mikro masalah dan membantu mengembangkan suatu kerangka peraturan kerja yang sesuai.

B. Strategi Pengembangan LKM di Filipina

Selama tahun 1970-an sampai pertengahan 1980-an pemerintah Filipina memobilisasi bank desa, bank pembangunan dan lembaga keuangan pemerintah lainnya dalam menyediakan subsidi kredit yang tinggi bagi masyarakat miskin di perdesaan. Pemerintah Filipina melalui *Directed Credit Programs* (DCP) berharap untuk menurunkan biaya kredit dan membantu mengurangi kemiskinan. Namun, seperti yang dialami oleh bank-bank desa dan koperasi untuk memberikan kredit kecil bagi orang miskin perdesaan, DCP gagal. Hal ini disebabkan oleh: (1) DCP tidak mencapai target sasaran, karena subsidi dipakai oleh peminjam non miskin, (2) karena DCP melibatkan dana pemerintah, korupsi terjadi di segala level, (3) permasalahan pembayaran kembali oleh peminjam menyebabkan biaya yang ditanggung pemerintah besar (Anonim, 2007).

Pelajaran berharga dalam pelaksanaan program kredit pemerintah di tahun 70-an dan 80-an memberikan kontribusi yang besar dalam pengembangan praktek dan operasional dari keuangan mikro. Sebuah pendekatan baru dalam metodologi kredit pun berkembang. Pada tahun 80-an organisasi non-pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menjadi mitra potensial dari pemerintah dalam memerangi kemiskinan. Melalui sektor keuangan mikro, mereka menyediakan banyak pinjaman yang dibutuhkan untuk kegiatan usaha kecil. LSM Keuangan Mikro merancang alternatif pilihan dalam instrumen pinjaman tanpa jaminan dan tabungan untuk orang miskin. LSM ini menyediakan pinjaman individu dan kelompok, tetapi menggunakan tekanan kelompok atau akuntabilitas kelompok sebagai pengganti jaminannya. Meskipun masalah peraturan tertentu dan isu kehati-hatian dihadapi LSM keuangan mikro, namun mereka mampu memenuhi kebutuhan pelaku usaha dari masyarakat miskin.

Keuangan mikro di Filipina dimulai sebagai inisiatif pembangunan sosial untuk pengentasan kemiskinan dan telah berubah dari marjinal menjadi utama ke arah komersialisasi dan bank mikro. Berbeda dari pendekatan pembangunan lainnya, “kredit mikro” bisa dipertahankan dari sumberdaya yang ada dan subsidi donor. Sebuah hal yang menarik bagi pejabat pemerintah, peraturan yang mendukung dan mobilisasi sumberdaya publik untuk mengadopsi program keuangan mikro dari lembaga keuangan mikro formal maupun semi formal dalam usaha pengentasan kemiskinan. Pada tahun 1993, pemerintah Filipina mencoba untuk menyusun *master plan* kredit untuk warga miskin.

Master plan mengidentifikasi tiga strategi untuk mengurangi kemiskinan melalui keuangan mikro, yaitu: (1) reformasi kebijakan, (2) mobilisasi sumberdaya keuangan, dan (3) peningkatan kemampuan. Langkah yang ditempuh untuk meningkatkan sumberdaya keuangan dengan membentuk organisasi *People's Credit and Finance Corporation* (PCFC) pada tahun 1996. Langkah kedua untuk mengembangkan lingkungan kebijakan yang kondusif dengan melobi terkait pasal pada Undang-Undang Republik 8425 dan pembentukan sebuah lembaga perwakilan pemerintah-the National Anti-Poverty Commission (NAPC). Langkah ketiga terkait dengan peningkatan kapasitas lembaga keuangan mikro, terutama melalui dana pemerintah melalui *People's Development Trust Fund* (PDTF).

C. Strategi Pemerintah Cina dalam Pengembangan LKM

Negara dunia yang paling padat penduduknya, Cina adalah rumah bagi 200 juta orang yang hidup dalam kemiskinan. Ini adalah 17% dari semua kaum miskin di dunia. Jika orang berharap untuk memecahkan kemiskinan global, Cina tidak dapat diabaikan (Clydesdale, 2008). Negara Cina memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan Bangladesh, diantaranya adalah (1) keuangan mikro lahir dari prinsip kapitalisme, hal ini bertentangan dengan paham sosialisme di Cina, (2) masyarakat miskin terkonsentrasi di daerah terpencil, daerah pegunungan dengan mayoritas mata pencaharian sebagai petani (Park, 2001), (3) kelompok di daerah pedesaan dan perkotaan sudah diorganisir menjadi unit hirarkis di bawah pemerintah pusat. Orang-orang tidak terbiasa bekerja di luar kelompok-kelompok ini. Oleh karena itu, lembaga keuangan mikro harus menciptakan kelompok-kelompok yang lebih mirip dari organisasi yang sudah ada, (4) Intervensi pemerintah yang kuat; Cina melarang non-lembaga keuangan dari menawarkan layanan keuangan kepada publik.

Menurut Beatriz dan Sarah Tsien (2002), replikasi pola Grameen Bank juga diterapkan di Cina dengan penyesuaian. Namun dalam perjalanannya, adanya intervensi pemerintah yang berlebihan dapat mengurangi kedisiplinan peminjam. Hal ini juga menurunkan kemungkinan LKM yang disponsori pemerintah berhasil menjadi mandiri dibandingkan dengan pinjaman komersial dan bantuan internasional. Guna keberhasilan dalam pemberdayaan LKM di Cina, maka diperlukan fokus terhadap perubahan strategi pemerintah yang telah disesuaikan dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat di Cina, yaitu:

- a. Peran utama LKM adalah menyalurkan dana donor, tabungan masyarakat dan tabungan di bank komersial untuk kaum miskin, terutama wanita;
- b. Mengarahkan LKM untuk menjadi mandiri. Dalam rangka mencapai kemandirian, LKM perlu terus berinovasi sehingga mereka dapat bebas dari lembaga donor dan pemerintah. Inovasi untuk kemandirian meliputi, diversifikasi risiko geografis, subsidi silang dari perkotaan ke daerah pedesaan, dan meningkatkan skala dan lingkup operasi LKM dalam rangka membawa biaya rata-rata pinjaman individu bawah;
- c. LKM harus meminta bantuan lebih teknis dari Grameen Trust Bangladesh, IPC dan ACCION International. Sebuah upaya yang terkoordinasi dalam memberikan pelatihan dasar yang dibutuhkan bagi para manajer LKM di Cina.
- d. Peningkatan kemampuan LKM dalam menyediakan informasi mengenai debitur dan juga pencatatan berkala terkait kredit peminjam. Hal ini sangat berguna dalam memberikan informasi yang dapat menguntungkan LKM bagi perkembangan usaha. Pemerintah dapat berperan sebagai badan koordinasi antara LKM dan Bank Komersial dalam penguatan modal dan penyaluran dana perbankan kepada masyarakat melalui LKM di daerah.
- e. LKM memerlukan transfer teknologi dan pelatihan tentang teknologi informasi diperlukan untuk pengumpulan data yang lebih efisien oleh para manajer dan untuk memfasilitasi pertukaran informasi yang saling menguntungkan antar LKM.

- f. LKM di Cina harus diprivatisasi. Hal ini akan membawa LKM menjadi lebih profesional dan akan berkontribusi pada perubahan mentalitas yang sangat dibutuhkan para peminjam. Selama LKM secara langsung dibiayai dan dikendalikan oleh pemerintah, mentalitas dari peminjam di daerah miskin akan terus tertinggal terhadap orientasi pasar para pengusaha di perkotaan.
- g. Pemerintah Cina harus menyediakan suatu kerangka hukum bagi LKM kompetitif untuk beroperasi dan berkembang di sepanjang sisi sektor perbankan komersial. Tidak seperti bank-bank komersial, di dunia internasional pedoman untuk mengatur LKM dalam kerangka hukum ini tidak ada.
- h. Pemberdayaan dan strategi pengembangan LKM dalam menghadapi liberalisasi keuangan yang sudah dekat dalam WTO. Bank-bank komersial Cina tidak dapat bersaing dengan bank umum gaya Barat, beberapa diantaranya sudah memiliki kehadiran penting di negara-negara tetangga Asia. Pemerintah Cina harus mulai mengantisipasi bahwa dalam munculnya persaingan dari bank asing, bank-bank domestik di Cina akan hilang atau semakin menjadi penyedia produk yang saat ini ditawarkan kepada orang miskin oleh LKM. Akhirnya, perbedaan antara bank komersial domestik dan LKM akan sangat kabur atau bahkan tidak bisa dibedakan. Dalam hal ini, pemerintah Cina harus siap untuk menghadapi tantangan ini.

Langkah Strategis Pengembangan LKM Di Indonesia

Permasalahan yang dihadapi oleh LKM terutama LKM bukan bank pada dasarnya dapat digolongkan ke dalam hal-hal yang bersifat internal dan eksternal. Yang bersifat internal meliputi keterbatasan sumberdaya manusia, manajemen yang belum efektif sehingga kurang efisien serta keterbatasan modal. Sementara faktor yang bersifat eksternal meliputi kemampuan monitoring yang belum efektif, pengalaman yang lemah serta infrastruktur yang kurang mendukung. Kondisi inilah yang mengakibatkan jangkauan pelayanan LKM terhadap usaha mikro masih belum mampu menjangkau secara luas, sehingga pengembangan LKM yang luas akan sangat penting perannya dalam membantu investasi bagi usaha mikro dan kecil serta berdampak pada pengentasan kemiskinan. Langkah strategis yang perlu dilakukan dalam pengembangan LKM adalah:

1. Pengembangan kapasitas kelembagaan LKM
Untuk mempersiapkan SDM pengelola LKM yang berkualitas. Menurut Krisnamurti (2005) dalam Ashari (2006), pengembangan kapasitas kelembagaan dapat dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga pendamping, dunia usaha, lembaga internasional, kerjasama antar LKM dan instansi pemerintah. Kerjasama dapat dilakukan terutama dalam peningkatan kemampuan SDM, sistem dan prosedur operasi, teknologi, jaringan usaha dan aksesibilitas terhadap berbagai dukungan dalam meningkatkan jangkauan pelayanan kepada masyarakat.
2. Memberikan kepastian hukum kepada LKM
Hal ini perlu dilakukan dengan tujuan memberikan status hukum yang jelas kepada berbagai LKM sehingga memungkinkan bank dan lembaga keuangan lainnya untuk melakukan hubungan bisnis yang wajar dengan LKM serta

mengizinkan LKM untuk menghimpun simpanan masyarakat dalam wilayah dan jumlah tertentu.

3. Penciptaan sistem pengaturan dan pengawasan yang efisien
Mendelegasikan pengaturan dan pengawasan kepada lembaga yang sesuai di daerah (provinsi/kabupaten), memastikan memadainya pendanaan, SDM pengawas, melakukan pendataan LKM di tingkat provinsi, serta melakukan penilaian kinerja LKM. Semua hal di atas dilakukan dalam rangka pembinaan dan pendampingan kelembagaan LKM.
4. Integrasi LKM dengan perbankan.
Pengembangan LKM diarahkan untuk menjadi mitra bank di desa. Melalui LKM, pihak bank dapat memanfaatkan jaringan LKM yang tersebar di pelosok desa untuk menyalurkan jasa pembiayaannya melalui LKM. Pemerintah dapat menjadi fasilitator terjalinnya kerjasama antara LKM dengan pihak perbankan.
5. Koordinasi dan sinkronisasi program lintas sektoral dalam pemberdayaan dan transformasi LKM.
Pemerintah telah mengeluarkan peraturan terkait dengan strategi pengembangan LKM dalam Keputusan Bersama Menkeu (Nomor: 351.1/KMK.010/2009), Mendagri (Nomor: 900-639A TAHUN 2009), Meneg KUKM (Nomor: 01/SKB/M.KUKM/IX/2009) dan Gubernur BI (Nomor: 11/43A/KEP.GBI/2009) tahun 2009. Sasaran pelaksanaan strategi pengembangan LKM ini adalah beralihnya LKM yang belum berbadan hukum menjadi Bank Perkreditan Rakyat atau Koperasi atau Badan Usaha Milik Desa, atau lembaga keuangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses peralihan atau transformasi ini diawali dengan terlebih dahulu melakukan pendataan, edukasi dan sosialisasi terhadap LKM yang belum berbadan hukum tersebut. Namun transformasi ini dilakukan dengan tahapan-tahapan yang matang sehingga fungsi dan peran LKM menjadi semakin besar bagi pengentasan kemiskinan di perdesaan.

Kesimpulan

- Pengembangan LKM dapat menjadi salah satu solusi efektif dalam pengentasan kemiskinan dengan bantuan peran dan intervensi dari berbagai pihak baik pemerintah, non-pemerintah serta masyarakat.
- Pentingnya lingkungan makroekonomi yang stabil dalam mendukung pengembangan LKM ke depan. Kurangnya stabilitas makroekonomi dapat menjadi kendala bagi pertumbuhan keuangan mikro di beberapa negara.
- Keunggulan LKM terletak pada komitmen yang kuat dalam memberdayakan usaha mikro/kecil, prosedur yang lebih fleksibel dan lokasinya yang terjangkau di perdesaan.
- Peran pihak lain sebagai donor dalam memperluas modal dasar LKM (integrasi dengan perbankan), pengembangan kapasitas SDM yang mengarah pada keberlanjutan organisasi dan pendampingan LKM. Oleh karena itu, subsidi bisa dibenarkan untuk mendukung LKM selama masih dalam ketentuan dan arah yang sesuai untuk keberlanjutan kelembagaan.

- Fokus pengembangan LKM bukan hanya dari sisi penguatan modal kredit kepada LKM, namun juga melakukan pengembangan lembaga dari sisi pengembangan SDM (pelatihan, *capacity building*), memperluas jangkauan pelayanan, pendampingan serta keberlanjutan keuangan LKM.
- Diperlukan langkah strategis pembuatan “payung” hukum LKM serta kebijakan pendukung lainnya dalam mengoptimalkan peran LKM bagi pengentasan kemiskinan di perdesaan.

Daftar Pustaka

- Anonim. 2007. *Philippine Microfinance Industry*. <http://aboutphilippines.info/filer/Philippine-Microfinance-Industry.pdf>. Diakses pada tanggal 17 Juni 2011.
- Anonim. 2009. *Perkembangan Data Usaha Mikro Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2005-2009*. Kementerian Koperasi dan UKM. Jakarta.
- Anonim. 2009. *Statistik Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2007-2008*. Kementerian Koperasi dan UKM. Jakarta.
- Anonim. 2010. *Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)*. Kementerian Pertanian. Jakarta.
- Anonim. 2011. *Enam Tantangan Lembaga Kredit Mikro*. Kompas, Rabu, 26 Januari 2011. Jakarta. <http://nasional.kompas.com/read/2011/01/26/14240329>. Diakses pada tanggal 11 Juni 2011.
- Anonim. 2011. *Batas Kemiskinan Versi BPS Naik*. Kompas, Minggu, 3 Juli 2011. Jakarta. http://cetak.kompas.com/read/2011/07/02/02154882/Batas_Kemiskinan.Versi.BPS.Naik. Diakses pada tanggal 3 Juli 2011.
- Anonim. 2011. *Garis Kemiskinan Naik 10,3% Setahun Terakhir*. Bisnis Indonesia, Minggu, 3 Juli 2011. Jakarta. <http://www.bisnis.com/ekonomi/makro/29537-garis-kemiskinan-naik-103-setahun-terakhir>. Diakses pada tanggal 3 Juli 2011.
- Armendariz, Beatriz dan Sarah Tsien. 2002. *A Case for Successful Microfinance Programs in Cina*. Paper for The 5th Conference on Global Economic Analysis, Taipeh, Taiwan. 5-7 Juni 2002. Taiwan.
- Ashari. 2006. *Potensi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaan dan Kebijakan Pengembangannya*. Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian, Volume 4 No. 2, Juni 2006: 146-164. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor.

- Clydesdale, Heather dan Kajal Shah. 2008. *Microfinance in China: Micro vs Mandarin*. <http://asiasociety.org/education-learning/for-students/global-topics/microfinance-china-micro-vs-mandarin>. Artikel tanggal 25 Agustus 2008. Diakses pada tanggal 11 Juni 2011.
- Fahreza S, Muhsin. 2010. *Peranan Sistem Grameen Bank terhadap Perbankan dalam Rangka Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*. Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Hassan, MD. Mahmudul. 2006. *Institutional Transformation of Poverty-Focused Microfinance Institutions in Bangladesh, Nepal, and Malaysia*. Thesis. Universiti Sains Malaysia. Malaysia.
- Ismawan, Bambang, d. 2002. *Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia Butuh Payung Regulasi*, artikel. www.binaswadaya.org, 7 Agustus 2002. Diakses pada tanggal 11 Juni 2011.
- Khandker S.R.(2003). "Micro-finance and poverty: evidence using panel data from Bangladesh". *World Development Vol.31 no. 3 pp.647-665*.
- Nurmanaf, A. Rozany. 2007. *Lembaga Informal Pembiayaan Mikro Lebih Dekat Dengan Petani*. Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian, Volume 5 No. 2, Juni 2007: 99-109. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor.
- Park, Albert. 2001. *Microfinance with Chinese Characteristics*. *World Development Vol. 29, No. 1, pp. 39-62, 2001*. www.elsevier.com/locate/worlddev. Diakses pada tanggal 17 Juni 2011.
- Sharma, Puspa Raj. 2007. *A Comparative Study of Microfinance in Nepal and Bangladesh*. Asian Development Bank. Philipines.
- Suharto, Pandu. 1989. *Grameen Bank, "Sebuah Model Bank Untuk Orang Miskin di Bangladesh"*. Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI). Jakarta.
- Wijono, W. 2005. *Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro sebagai Salah Satu Pilar Sistem Keuangan Nasional: Upaya Konkrit Memutus Rantai Kemiskinan*. Kajian Ekonomi dan Keuangan (Edisi Khusus). Pusat Pengkajian Ekonomi dan Keuangan. Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan dan Kerjasama Internasional. Departemen Keuangan.
- Wardoyo dan Hendro Prabowo. *Kinerja Lembaga Keuangan Mikro bagi Upaya Penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Wilayah Jabotabek*. Paper. Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma. Depok. Jawa Barat.

- Yoseva dan Teuku Syarif. 2010. *Kajian Kemanfaatan Bantuan Perkuatan Untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah (UMKM)*. Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM Volume 5, Agustus 2010, Hal. 30-48. Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK. Kementerian Koperasi dan UKM. Jakarta.
- Zain, Djumilah. 1996. *Strategi Pengentasan Kemiskinan Melalui Bantuan Modal Bagi Rumah Tangga Miskin di Pedesaan*. Laporan Penelitian. Lembaga Penelitian Universitas Brawijaya. Malang. Jawa Timur.